

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi wilayah Indonesia yang berada pada sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania menyebabkan wilayah Indonesia rawan terhadap bencana. Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania merupakan tempat bertemunya kedua buah lempeng besar yakni lempeng tektonik dan lempeng vulkanik. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana yakni erupsi gunung berapi dan gempa bumi. Selain itu Indonesia juga tergolong ke dalam negara yang beriklim tropis dengan suhu udara yang hangat dan curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi pada musim penghujan menyebabkan wilayah Indonesia seringkali dilanda bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Definisi bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat diartikan sebagai serangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan berada diluar kuasa atau kendali manusia seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tanah longsor, banjir, tsunami, rob, dan puting beliung. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa non alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, dan

wabah penyakit. Berikutnya bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat serta ancaman atau teror.

Bencana yang sering terjadi di Indonesia lebih banyak didominasi oleh bencana alam. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis dan topografis wilayah Indonesia yang beranekaragam terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, laut, sungai, dst. Data tentang jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.1
Jenis Bencana Alam yang terjadi di Indonesia

Jenis Bencana	2022	2023	2024
Gempa Bumi	28	31	18
Erupsi Gunung Berapi	1	4	5
Kebakaran Hutan dan lahan	252	2.051	336
Kekeringan	4	174	54
Banjir	1.531	1.255	962
Tanah Longsor	634	591	120
Gelombang Pasang dan Abrasi	26	33	13
Cuaca Ekstrem	1.068	1.261	410
Jumlah	3.544	5.400	1.918

Sumber : bnpb.go.id

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa bencana banjir, karhutla dan cuaca ekstrim menjadi tiga bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Ketiga bencana tersebut termasuk kedalam bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk. Selain disebabkan oleh fenomena cuaca yang buruk, bencana alam yang terjadi juga dipengaruhi oleh pemanasan global dan semakin maraknya *deforestasi* hutan untuk dialihfungsikan menjadi areal permukiman, pertanian, dan perkebunan. Banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya selalu mengakibatkan kerugian baik harta benda maupun korban jiwa. Bahkan masyarakat yang wilayahnya terdampak bencana rela untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman demi terhindar dari bencana.

Tabel 1.2
Jumlah Korban Bencana yang terjadi di Indonesia

Keterangan	2022	2023	2024
Jumlah Bencana	3.544	5.400	1.918
Meninggal Dunia	858	275	462
Hilang	37	33	60
Luka-luka	8.733	5.795	1.133
Mengungsi	6.144.534	8.491.288	5.552.077

Sumber : bnpb.go.id

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah bencana yang terjadi di Indonesia cenderung fluktuatif dari tahun ketahun sesuai dengan kondisi iklim sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, hilang, dan juga luka-luka. Selain itu jumlah masyarakat yang mengungsi juga mengalami kondisi yang serupa setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa masalah

kebencanaan menjadi salah satu ancaman serius yang harus segera ditangani agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman tanpa khawatir terjadi bencana. Berdasarkan pertimbangan tersebut akhirnya pemerintah membentuk dua buah badan yang bertanggung jawab untuk menanggulangi bencana baik yang ada di pusat maupun di daerah.

Badan tersebut ialah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BNPB dan BPBD menjadi wadah bagi pemerintah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penanggulangan bencana yang ada di pusat maupun di daerah. Adanya BNPB dan BPBD diharapkan dapat menjadi *leading sector* dalam penanggulangan bencana sehingga kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan lebih efektif. Salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh BNPB dalam upaya mengurangi risiko bencana yang ada di daerah adalah dengan membentuk program kelurahan tangguh bencana (Katana). Program kelurahan tangguh bencana dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Definisi desa/kelurahan tangguh bencana berdasarkan Perka BNPB No 1 tahun 2012 adalah suatu desa/kelurahan yang telah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menghadapi segala macam ancaman bencana, serta memiliki kemampuan untuk memulihkan diri secepat mungkin dari dampak bencana yang ditimbulkan. Tujuan dari dibentuknya kelurahan tangguh bencana adalah untuk memberikan pengetahuan dan juga meningkatkan

kemampuan masyarakat di tingkat kelurahan dalam menghadapi bencana, baik bencana alam maupun non alam. Dengan demikian desa/kelurahan tangguh bencana dapat dimaknai sebagai sebuah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali potensi bencana yang ada di wilayahnya serta mampu mengorganisir sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mengurangi resiko bencana yang mungkin saja terjadi. Program kelurahan tangguh bencana juga mengedepankan beberapa aspek yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan meliputi aspek legislasi, aspek perencanaan, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek pengembangan kapasitas, dan aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Aspek-aspek tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memberikan penilaian kepada desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan program desa/kelurahan tangguh bencana.

Desa/kelurahan tangguh bencana sendiri terbagi menjadi 3 kriteria yakni desa/kelurahan tangguh bencana utama, desa/kelurahan tangguh bencana madya, dan desa/kelurahan tangguh bencana pratama. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan capaian dari masing-masing aspek indikator yang ada dalam desa/kelurahan tangguh bencana. Program destana/katana mulai dilaksanakan pertama kali pada tahun 2012 dan terus berjalan hingga sekarang. Salah satu provinsi yang sedang giat dalam mengembangkan program desa/kelurahan tangguh bencana adalah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari lima provinsi di Indonesia yang paling sering dilanda bencana.

Dikutip dari (*databoks.katadata.co.id*) selama kurun waktu 2021-2023 Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kedua wilayah yang paling banyak dilanda bencana alam yakni sebanyak 1.545 kejadian dibawah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.078 kejadian. Jawa Timur di posisi ketiga dengan 1.011 kejadian, kemudian diposisi keempat ada Sulawesi Selatan dengan 974 kejadian, dan posisi kelima ditempati Aceh dengan 788 kejadian. Data tentang jumlah kejadian bencana dari setiap provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.3
Provinsi dengan Jumlah Kejadian Bencana Tertinggi

Provinsi	2021	2022	2023	Total
Jawa Tengah	622	343	580	1.545
Jawa Timur	309	268	434	1.011
Jawa Barat	768	556	754	2.078
Aceh	421	137	230	788
Sulawesi Selatan	629	77	268	974

Sumber : databoks.katadata.co.id

Menjadi wilayah yang paling sering dilanda bencana membuat Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk mengurangi dampak risiko bencana yang terjadi, salah satunya dengan menggalakkan program desa/kelurahan tangguh bencana. Pada tahun 2023 tercatat ada 133 destana/katana yang telah dibentuk oleh Pemprov Jateng. Berdasarkan data dari BPS Prov.Jawa Tengah diketahui bahwa terdapat enam jenis bencana alam yang paling sering melanda Prov.Jawa Tengah. Bencana tersebut antara lain banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, karhutla, dan gelombang pasang atau rob.

Tabel 1.4
Data Bencana yang Terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024

Jenis Bencana	2024
Banjir	131
Tanah longsor	126
Kekeringan	34
Karhutla	491
Cuaca ekstrim	115
Jumlah	897

Sumber : jateng.bps.go.id

Daerah-daerah yang telah menerapkan program destana/katana di Prov. Jawa Tengah antara lain Banjarnegara, Pekalongan, Temanggung, Klaten, Demak, Karanganyar, Banyumas, Kendal, Pemalang, Purworejo, Kebumen, Magelang, Wonogiri, Pati, Purwokerto, dan Semarang. Penerapan program destana/katana di wilayah tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko bencana sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat yang ada di daerah agar lebih siap dalam menghadapi bencana. Menurut Munir (2016:13) analisis pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah apa yang sesuai dan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan tanggap dalam menghadapi bencana. Sebagai salah satu wilayah di Prov.Jawa Tengah yang sering dilanda bencana Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk mengurangi dampak bencana yang terjadi. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPBD Kota Semarang selama tahun 2021-2024 tercatat lebih dari 500 kejadian bencana alam yang terjadi di Kota

Semarang. Bencana tersebut antara lain banjir, tanah longsor, kebakaran, rob, puting beliung, pohon tumbang, talud longsor. dsb.

Tabel 1.5
Data Kejadian Bencana Alam yang Kerap Terjadi di Kota Semarang

Jenis Bencana	2021	2022	2023
Banjir	12	74	26
Tanah longsor	3	142	6
Kebakaran	149	118	469
Jumlah	164	334	501

Sumber : bpbds.semarangkota.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir kejadian bencana alam di Kota Semarang menunjukkan angka yang fluktuatif yang didominasi oleh kebakaran, banjir, dan tanah longsor. Kejadian bencana yang terjadi di Kota Semarang tersebut berdampak pada banyaknya korban jiwa baik yang mengalami luka-luka, hilang, maupun meninggal dunia. Selain itu bencana yang terjadi di Kota Semarang juga mengakibatkan kerugian materil yang disebabkan karena rusaknya bangunan dan fasilitas umum, hilangnya harta benda, serta kegiatan perekonomian yang terhambat. Data tentang jumlah korban dan kerugian yang disebabkan oleh bencana di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6
Data Korban dan Kerugian Akibat Bencana di Kota Semarang

Keterangan	2021	2022	2023
Korban banjir	790	44	1578
Korban tanah longsor	1.119	44	1.955

Korban kebakaran	89	15	0
Kerugian	1.188.000.000	5.250.000.000	25.117.450

Sumber : *bpbd.semarangkota.go.id*

Akibat tingginya angka kerugian yang disebabkan oleh bencana di Kota Semarang membuat Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk mengurangi dampak bencana yakni dengan melaksanakan program kelurahan tangguh bencana. Pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana juga didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang dan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Sampai dengan tahun 2024 tercatat ada lebih dari 41 kelurahan tangguh bencana yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah mengingat luasnya wilayah Kota Semarang dan karakteristik wilayahnya yang beragam.

Tabel 1.7

Data Jumlah Bencana Setiap Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	2019	2020	2021
1	Mijen	-	-	1
2	Gunung Pati	-	-	-
3	Banyumanik	1	1	-
4	Gajah Mungkur	-	-	-
5	Semarang Selatan	-	-	-
6	Candisari	-	-	-

7	Tembalang	4	4	4
8	Pedurungan	3	1	-
9.	Genuk	8	6	5
10.	Gayamsari	5	-	-
11.	Semarang Timur	1	1	7
12.	Semarang Utara	-	-	-
13.	Semarang Tengah	-	-	-
14.	Semarang Barat	-	-	-
15.	Tugu	3	3	4
16.	Ngaliyan	-	1	1
	Total	25	17	25

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih dari separuh wilayah yang ada di Kota Semarang termasuk ke dalam daerah yang rawan dilanda bencana. Wilayah yang sering dilanda bencana di Kota Semarang kebanyakan terletak di wilayah Semarang bagian atas dan Semarang bagian bawah. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis wilayah tersebut yang berupa perbukitan dan dataran rendah. Pembentukan kelurahan tangguh bencana di Kota Semarang juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut agar memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana seperti banjir, dan tanah longsor yang seringkali terjadi.

Tabel 1.8
Data Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Semarang

No	Kelurahan	Pembentukan	Ancaman Bencana	Sumber Dana
1	Wonosari	2017	Banjir	APBD
2	Gondoriyo	2017	Banjir	APBD
3	Kalipancur	2017	Banjir/tanah longsor	APBD
4	Randusari	2017	Tanah longsor	APBD
5	Mangkang Kulon	2017	Banjir/rob	APBD
6	Mangkang Wetan	2017	Banjir bandang/rob	APBD
7	Mangun harjo	2017	Banjir bandang/rob	APBD
8	Sukorejo	2017	Tanah longsor/tanah gerak/kebakaran	APBD
9	Kemijen	2017	Banjir/rob	APBD
10	Rowosari	2017	Banjir/kekeringan	APBD
11	Kaligawe	2017	Banjir kekeringan	APBD
12	Beringin	2018	Banjir	APBD
13	Wates	2018	Banjir	APBD
14	Tinjomoyo	2018	Tanah longsor	APBD
15	Trimulyo	2018	Banjir/rob	APBD
16	Tanjung Mas	2018	Banjir/rob	APBD
17	Meteseh	2020	Banjir	APBD
18	Muktiharjo Kidul	2020	Banjir	APBD
19	Krobokan	2020	Banjir	APBD
20	Karangroto	2020	Banjir	APBD
21	Lempongsari	2020	Tanah longsor	APBD
22	Randugarut	2021	Banjir	APBD
23	Tambakaji	2022	Banjir	APBD
24	Gebangsari	2022	Kebakaran, banjir	APBD

25	Gajahmungkur	2022	Tanah longsor	APBD
26	Jabungan	2022	Tanah longsor	APBD

Sumber : bcbd.semarangkota.go.id

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis bencana alam yang sering terjadi di Kota Semarang adalah tanah longsor dan banjir meliputi banjir bandang dan banjir rob. Bencana tersebut termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi yang hampir setiap tahun terjadi di Kota Semarang. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan mengingat kondisi geografis Kota Semarang yang rentan terhadap berbagai bencana. Dengan dibentuknya kelurahan tangguh bencana pemerintah berharap dapat mengurangi risiko bencana yang terjadi melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup dalam menanggulangi bencana. Pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya sinergitas dan kolaborasi antar *stakeholders* yang saling terlibat. Skema kolaborasi tersebut dikenal dengan istilah *collaborative governance*. Pihak-pihak yang terlibat dalam skema tersebut terdiri dari sektor pemerintah sebagai *leading sector*, dibantu dengan kelompok masyarakat dan juga NGO lain sebagai *supporting system*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Machruf et al. (2020) yang berjudul Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif *Collaborative Governance* diperoleh hasil bahwa dengan adanya skema *collaborative governance* mampu memperbaiki proses penanggulangan bencana meliputi penambahan anggaran pada dinas terkait, penambahan jumlah sarana dan prasarana, serta adanya

sosialisasi bersama yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dan juga swasta. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Khoirurrosyidin et.al (2021) dengan judul *Dinamika Praktik Collaborative Governance* di Bidang Kebencanaan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur diperoleh hasil bahwa praktik penanggulangan kebencanaan yang dilakukan belum sesuai dengan prinsip-prinsip *collaborative governance* hal tersebut dikarenakan belum adanya *NGO* dan *LSM* yang dilibatkan serta minimnya peran masyarakat dalam program tersebut, namun secara keseluruhan pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Ngabar Ke.Siman sudah berjalan dengan cukup baik berkat adanya peran yang dominan dari pihak pemerintah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo et al (2021) yang berjudul *Model Collaborative Governance dalam Pembangunan Desa Pada Masa Covid-19: Studi di Kabupaten Lampung Selatan* menunjukkan hasil bahwa model *collaborative govenance* belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa, dikarenakan masih lemahnya kerjasama antar aktor yang terlibat sehingga menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun *stakeholder* non pemerintah lainnya. Selain itu tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan membuat kerjasama tersebut kurang berjalan dengan optimal. Sementara penelitian lain yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2021) dengan judul *Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara*

memperoleh hasil bahwa proses *collaborative governance* belum optimal hal tersebut disebabkan karena adanya kendala dalam *Mou* dengan *stakeholders* dan juga legalitas program yang belum jelas sehingga menghambat proses kolaborasi. Selain itu beberapa *stakeholders* juga mengalami kendala komunikasi yang disebabkan oleh pandemi covid-19 di Indonesia.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah *gap* (kesenjangan) yang kemudian menjadi celah bagi peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan *collaborative governance* dan kelurahan tangguh bencana (katana). Penelitian lebih berfokus pada proses kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam melaksanakan program kelurahan tangguh bencana. Selain itu juga penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang ada dalam program katana di Kel.Tanjung Mas Kota Semarang.

Proses kolaborasi yang melibatkan banyak aktor dalam penanggulangan bencana di Kel.Tanjung Mas tak luput dari beberapa permasalahan yang dihadapi di lapangan. Permasalahan tersebut diantaranya masih adanya *miss* komunikasi antar aktor yang terlibat, sulitnya berkoordinasi dengan beberapa pihak selama proses penanggulangan bencana, serta minimnya partisipasi dari warga lokal atau masyarakat sekitar dalam mengikuti berbagai kegiatan dalam upaya mengurangi risiko bencana seperti banjir dan rob. Permasalahan tersebut yang kemudian perlu untuk segera diselesaikan agar program kelurahan Tangguh bencana di Kel.Tanjung Mas dapat berjalan dengan baik.

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007:544) merupakan sebuah proses kerjasama yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dengan organisasi non pemerintah (swasta) dalam pengambilan keputusan bersama guna mengelola suatu program atau kebijakan. Menurut Liu et al. (2020) skema *collaborative governance* dengan pemerintah sebagai penyedia platform yang memfasilitasi hubungan antara industri dan masyarakat bertujuan untuk mencapai inovasi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Emerson et al. (2011) dalam penelitiannya memperkenalkan istilah CGR (*Collaborative Governance Regime*) yang menunjukkan skema kolaborasi lintas batas yang mewakili determinasi perilaku, pengambilan keputusan, dan aktivitas. CGR berawal dari konteks sistem yang dalam perkembangannya lambat laun dipengaruhi oleh dua komponen yaitu dinamika kolaboratif dan tindakan kolaboratif, serta berbagai elemen yang ada di dalamnya. Kelurahan tangguh bencana yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah Kelurahan Tanjung Mas yang berada di Kec.Semarang Utara. Alasan dipilihnya kelurahan tanjung mas menjadi lokasi penelitian disebabkan oleh beberapa hal diantaranya dari sisi kerentanan/kerawanan terhadap bencana Kelurahan Tanjung Mas termasuk ke dalam wilayah yang rawan terhadap bencana. Bencana yang sering terjadi di Kelurahan Tanjungmas adalah banjir, rob, dan kebakaran, kedua dari sisi ketersediaan logistik wilayah Kel.Tanjung Mas merupakan wilayah sentral yang menjadi pintu masuk ekspor/impor barang dan jasa, serta kawasan industri yang perlu untuk dilindungi dari ancaman

bencana, ketiga kawasan Tanjung Mas merupakan salah satu ikon Kota Semarang dimana terdapat tempat wisata populer yakni Kota Lama yang setiap tahunnya mampu menarik banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara sehingga menjadi aset berharga yang perlu dilindungi oleh pemerintah agar tidak sampai terkena dampak bencana. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana Berbasis *Collaborative Governance* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kelurahan Tanjung Mas merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang sering dilanda bencana setiap tahunnya. Bencana yang sering melanda Kel.Tanjung Mas yakni banjir, rob, dan kebakaran.
2. Keterbatasan sumber daya, tidak adanya insentif, serta kurang efektifnya pembentukan organisasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat menyebabkan program kelurahan tangguh bencana tidak dapat berjalan dengan maksimal.
3. Kurangnya keterlibatan dan peran serta *NGO* menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana.
4. Pemerintah masih menjadi aktor yang paling dominan dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana sehingga menyebabkan masyarakat selalu bergantung dan belum mampu mencapai kemandirian dalam penanganan bencana.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana berbasis *collaborative governance* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana berbasis *collaborative governance* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana berbasis *collaborative governance* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana berbasis *collaborative governance* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana yang berbasis *collaborative governance*. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut kedepannya

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang tentang pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana berbasis *collaborative governance*. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam mengembangkan program kelurahan tangguh bencana sehingga masyarakat dan pemerintah dapat mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

1.6 Tinjauan Pustaka (Reviu Literatur)

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam kepada peneliti tentang penelitian yang akan dilakukan kedepannya. Penelitian terdahulu juga menjadi acuan bagi peneliti untuk lebih fokus kepada permasalahan yang dihadapi berdasarkan referensi dari penelitian lain. Berdasarkan judul penelitian tentang pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana berbasis *collaborative governance* maka peneliti telah memilih beberapa jenis penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut diantaranya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Machruf et al.(2020) dengan tujuan untuk mengidentifikasi kolaborasi dalam upaya penanggulangan pra bencana di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian tersebut menggunakan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa skema kolaborasi yang

menggunakan model *collaborative governance* mampu untuk memperbaiki upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratama et al. (2020) dengan tujuan untuk mengidentifikasi kolaborasi antara pemerintah dan lembaga organisasi kemasyarakatan dalam tata kelola kebencanaan, serta bagaimana modal sosial yang tercipta di masyarakat usai dilanda bencana. Teori yang digunakan adalah teori *collaborative governance* dari Ansel dan Gash serta teori modal sosial dari Dudwick. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi dalam tata kelola kebencanaan dilakukan secara bersama-sama oleh tokoh pemuda dan masyarakat dengan didampingi oleh pihak swasta dan juga pemerintah. Pada akhirnya kolaborasi tersebut mampu untuk meningkatkan solidaritas, kepercayaan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk saling terlibat dalam penanggulangan bencana.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Febrian (2016) dengan tujuan untuk mengidentifikasi kolaborasi antar *stakeholders* dalam membangun kawasan perdesaan. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Stephen Balogh. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa model *collaborative governance* belum mampu untuk mempercepat pembangunan kawasan perdesaan. Hal tersebut dikarenakan masih besarnya ego sektoral antar *stakeholders* sehingga proses kolaborasi belum berjalan dengan optimal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sambodo (2016) dengan tujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan *collaborative governance* di Desa Brosot

Kabupaten Kulonprogo. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori *collaborative governance* dari Ansel dan Gash. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antar *stakeholders* dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh beberapa hal yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat diantaranya gotong royong, musyawarah mufakat, kepemimpinan paternalistik, dan hubungan kekerabatan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Putri et al. (2016) dengan tujuan untuk menganalisis implementasi program kelurahan tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori implementasi yang dikemukakan oleh R.Dye dan teori evaluasi dampak yang dikemukakan oleh Rochyati. Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi program kelurahan tangguh bencana belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dikarenakan kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta minimnya koordinasi dan sinergitas antar instansi yang saling terlibat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Munir (2016) dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan program desa tangguh bencana di Kabupaten Kendal. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori implementasi dari R.Dye. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan program desa/kelurahan tangguh bencana mampu memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang ancaman bencana sehingga dapat mengurangi resiko bencana yang mungkin saja terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2022) dengan tujuan untuk menganalisis kolaborasi antar *stakeholders* dalam optimalisasi desa/kelurahan tangguh bencana di Provinsi Jawa Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori penta helix model. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana di provinsi jawa tengah masih belum optimal. Hal tersebut terbukti dari 8562 desa/kelurahan di Prov.Jawa Tengah hanya 691 desa/kelurahan yang menerapkan program destana/katana. Selain itu belum maksimalnya peran dari masing-masing *stakeholders* turut menjadi kendala dalam pelaksanaan program destana/katana di Prov.Jawa Tengah.

Penelitian lain dilakukan oleh Setiawan et al.(2021) dengan tujuan untuk menganalisis *collaborative governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. Teori yang digunakan adalah teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *collaborative governance* belum optimal hal tersebut disebabkan karena adanya kendala dalam *Mou* dengan *stakeholders* dan juga legalitas program yang belum jelas sehingga menghambat proses kolaborasi. Selain itu beberapa *stakeholders* juga mengalami kendala komunikasi yang disebabkan oleh pandemi covid-19.

Penelitian berikutnya juga dilakukan oleh Purnaweni et al.(2018) dengan tujuan untuk menganalisis perkembangan kelompok masyarakat pesisir untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah

peraturan terkait pengembangan kawasan pesisir tangguh (PKPT). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketahanan masyarakat lokal terhadap ancaman bencana, perubahan iklim, dan sumber daya alam masih sangat rendah sehingga memerlukan perhatian dan kerjasama dari beberapa pihak seperti masyarakat sekitar, pemerintah, dan juga pihak swasta.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktari (2019) dengan tujuan untuk mengidentifikasi kapasitas dan ketangguhan masyarakat dan aparatatur pemerintah dalam menghadapi bencana melalui program desa tangguh bencana. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang penyelenggaraan program desa/kelurahan tangguh bencana. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kegiatan dalam program destana yang sudah dijalankan seperti tersusunnya PRB, terbentuknya forum pengurangan resiko bencana, serta peta resiko dan peta evakuasi bencana. Namun masih banyak kegiatan lain yang belum dapat dijalankan disebabkan minimnya keterlibatan *multistakeholders* dalam program destana yang ada di Desa Lam Teungoh, Kab. Aceh Besar.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bae et al.(2021) dengan tujuan untuk mengidentifikasi kolaborasi dalam manajemen bencana di Korea Selatan melalui sistem desentralisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori desentralisasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Korea Selatan telah menerapkan kolaborasi dalam sistem manajemen bencana secara bersamaan yakni dengan sentralisasi dan desentralisasi. Hal tersebut dapat mempermudah koordinasi antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah kebencanaan di Korea Selatan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Russel et al (2021) dengan tujuan untuk mengidentifikasi proses *collaborative governance* dalam pengurangan resiko bencana di Nepal. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori dari Ansel dan Gash serta dianalisis menggunakan metode *Disaster Risk Reduction Management Act* (DRRM Act). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi dalam program pengurangan resiko bencana di Nepal tidak berjalan dengan begitu baik. Hal tersebut dikarenakan pemerintah mengesampingkan aspek partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan program tersebut.

Berdasarkan beberapa jenis penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas maka peneliti bermaksud untuk mencari kebaruan informasi tentang pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang berdasarkan kombinasi model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Emerson et al. serta Ansel dan Gash guna mencari alternatif terbaik dalam menangani masalah bencana.

1.6.1 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan sebuah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang serangkaian tindakan rasional yang kemudian diteruskan menjadi sebuah tindakan yang dipertimbangkan secara detail dan teliti guna merealisasikan tujuan yang ingin dicapai secara maksimal (Anggara, 2012:29). Administrasi publik erat kaitannya dengan istilah organisasi dan

juga manajemen. Organisasi dalam hal ini merupakan sebuah wadah yang berisi hubungan struktural antar setiap anggota berdasarkan wewenang yang dimiliki dalam sistem administrasi. Manajemen dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui kerjasama dengan mengedepankan rasionalitas dalam sistem administrasi. Definisi lain dari administrasi publik juga disampaikan oleh Hadari Nawawi (2013:5), yang menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikutnya menurut Keban (2014:4) administrasi publik merujuk pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas yang dikenal dengan lembaga pemerintah atau negara. Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Herbert A. Simon dalam Syafie (2013:3), mengartikan administrasi publik sebagai kegiatan sebuah kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, jadi baginya administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Pengertian administrasi publik memiliki beberapa makna sesuai yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Caiden yang dikutip oleh Thoha (2008:7), administrasi publik diartikan sebagai suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (*public business*). Hal ini meliputi segala sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai

jawaban masyarakat terhadap masalah-masalah yang memerlukan pemecahan-pemecahan kolektif bukan perorangan, melalui suatu bentuk intervensi pemerintah di luar intervensi-intervensi sosial dan pihak swasta. Dwight Waldo yang dikutip oleh Syafie (2013:33), mengartikan administrasi publik sebagai manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Berdasarkan definisi dari para ahli diatas pada prinsipnya administrasi publik mempunyai pengertian yang sama yaitu kerja sama yang dilakukan oleh beberapa orang, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan berdasarkan asas rasionalitas

1.6.2 Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi publik yang berfokus pada bagaimana cara untuk mengatur dan mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi publik guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Menurut Shafritz dan Russel dalam Keban (2008:93) manajemen publik diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sebagai bentuk tanggungjawab dalam mengelola organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Pendapat lain dikemukakan oleh Overman dalam Keban (2004:85) yang menyatakan bahwa manajemen publik adalah sebuah interdisipliner ilmu yang mencakup aspek-aspek umum dari sebuah organisasi, serta merupakan gabungan dari fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengaktualisasian, dan pengawasan di satu sisi, sedangkan disilain meliputi sumberdaya manusia (SDM), keuangan,

fisik, informasi, dan politik. Selanjutnya menurut Donovan dan Jackson dalam Nawawi (2013:11-12) manajemen publik dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan serangkaian keterampilan (*skill*). Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli tentang definisi dari manajemen publik, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa manajemen publik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang organisasi dan fungsi-fungsi didalamnya meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki guna mencapai tujuan bersama. Manajemen publik menjadi perhatian utama dalam tata kelola pemerintahan (*governance*) untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam perkembangannya penerapan manajemen publik di sektor pemerintahan membutuhkan lebih banyak aktor-aktor lain diluar sektor pemerintah seperti pihak swasta, LSM, kelompok masyarakat, dan juga akademisi guna mempercepat kinerja pemerintah serta menjadi *ceck and balance* terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dengan aktor-aktor lain di luar sektor pemerintah tersebut sering dikenal dengan istilah *collaborative governance* atau tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. *Collaborative governance* akan memudahkan pemerintah dalam membagi peran dengan *stakeholders* lain dalam menjalankan serta mengelola setiap program atau kebijakan.

1.6.3 Governance

Governance berasal dari kata “*govern*” yang bermakna mengambil peran yang lebih besar meliputi seluruh proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan serta pengendalian masalah-masalah kolektif yang ada di masyarakat. Dalam artian yang lebih luas, *governance* mencakup seluruh lembaga dan unsur masyarakat, baik dari pemerintah maupun dari non-pemerintah (Dwiyanto, 2015:251). Selanjutnya menurut Kurniawan (2007:16-17) mengartikan *Governance* adalah sebuah proses pembuatan kebijakan dimana dalam pembuatan kebijakan tersebut melibatkan negara (pemerintah), sektor privat (swasta), dan masyarakat sebagai aktornya. Kemudian *Economic Co-operation and Development* (OECD) mengartikan *governance* sebagai sebuah penggunaan otoritas politik dan pelaksanaan kontrol atas masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Sejalan dengan pernyataan tersebut Stoker (2002:18) menjelaskan *governance* adalah tentang peraturan pengambilan keputusan secara kolektif pada lingkungan dimana ada sejumlah aktor atau organisasi dimana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan persyaratan hubungan antar aktor dan organisasi tersebut.

Governance merupakan sebuah paradigma baru yang menggantikan paradigma sebelumnya yakni *government*. Pergantian tersebut dikarenakan paradigma *government* hanya berpangku pada satu aktor saja yakni pemerintah sehingga cenderung kaku, sedangkan paradigma *governance* melibatkan tiga aktor dalam penyelenggaraan pemerintahannya yakni

pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sehingga proses pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien karena tidak berpangku pada satu aktor saja. Bergesernya paradigma *government* ke arah *governance* menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, oleh sebab itu dikembangkan paradigma administrasi publik baru yang disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Santoso, 2008:130-131). Menurut Abidin (2013:10) terdapat 3 (tiga) aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*, ketiga aktor tersebut yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dalam *governance* pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang menyelenggarakan proses pemerintahan, oleh sebab itu diperlukan aktor lain yang dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan, karena kemampuan dari pemerintah yang terbatas.

Swasta sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam proses pemerintahan dapat memberikan dukungan finansial berupa sumbangan dana yang berguna untuk mendukung pelaksanaan program atau kebijakan. Selanjutnya masyarakat yang juga menjadi aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan dukungan berupa saran dan masukan kepada pemerintah terkait dengan program atau kebijakan yang sedang dijalankan. Dengan adanya aktor lain yang berperan dalam proses tata kelola pemerintahan diharapkan penyelenggaraan pemerintahan kedepannya dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sebab proses pemerintahan yang

dulunya hanya bergantung pada peran pemerintah saja, menjadi lebih kompleks dengan adanya dukungan dari aktor lain yakni pihak swasta dan juga masyarakat.

Menurut Stoker (2002:18) terdapat 5 proposisi dalam *governance* yang meliputi :1) *Governance* mengacu pada seperangkat institusi atau aktor yang terlibat baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, 2) *Governance* mengidentifikasi kekaburan batas dan tanggung jawab untuk menangani masalah sosial dan ekonomi, 3) *Governance* mengidentifikasi ketergantungan dalam hubungan antar institusi-institusi atau aktor yang terlibat dalam aksi kolektif, 4) *Governance* adalah tentang jaringan aktor pemerintahan yang otonom, 5) *Governance* memberikan penyadaran bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan tidak perlu bergantung kepada kewenangan pemerintah.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat diketahui bahwa *governance* adalah sebuah tata kelola pemerintahan dimana pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatannya melibatkan tiga aktor utama yakni pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Paradigma *governance* mengaburkan atau menghilangkan batas-batas antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam sebuah pengambilan keputusan. Dengan hilangnya batas-batas antara sektor pemerintah, swasta, dan juga masyarakat diharapkan akan terjalin kerjasama dalam proses tata kelola pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan

lebih baik. Tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif dan dinamis menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan sebuah program atau kebijakan yang telah dibuat demi kepentingan bersama.

1.6.4 Collaborative Governance

1.6.4.1 Definisi Collaborative Governance

Salah satu bentuk dari tata kelola pemerintahan atau *governance* adalah *collaborative governance*. Konsep *collaborative governance* sendiri menyatakan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat saling bekerjasama untuk menghasilkan sebuah produk hukum berupa aturan atau kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Definisi *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007:544)

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets”

Pendapat Ansell dan Gash tersebut menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses kerjasama antara organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah (swasta), dan juga masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama untuk menerapkan atau mengelola sebuah program/kebijakan.

Thomson dan Perry dalam Islamy (2018:2) menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah sosial yang beragam antar para pemangku kepentingan, dan

juga merumuskan rencana pembangunan daerah untuk lingkungan yang kreatif, deliberatif dan saling menguntungkan. Menurut Emerson (2011:2) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah proses yang terstruktur dalam pengambilan keputusan bersama dan manajemen kebijakan yang melibatkan sekelompok orang secara konstruktif melalui badan publik/pemerintahan, swasta dan masyarakat sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai seorang diri. *Collaborative governance* merupakan sebuah *framework* atau kerangka kerja yang sengaja dibuat untuk memudahkan pemerintah dalam menjalankan sebuah program atau kebijakan dengan melibatkan organisasi lain diluar sektor pemerintahan. Sektor swasta dan juga kelompok masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan.

1.6.4.2 Model *Collaborative Governance*

Model *collaborative governance* terkini yang dikemukakan oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh dikenal dengan istilah *CGR (Collaborative Governance Regime)*. Model *CGR* ialah model yang merupakan penyempurnaan dari teori kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash. Skema kolaborasi yang ada dalam *CGR* meliputi beberapa tahapan sebagai berikut.

1) *System context* (Konteks sistem)

System context dalam model *collaborative governance regime* merupakan sebuah lapisan yang membentuk tata kelola pemerintahan

yang dipengaruhi oleh konteks politik, hukum, sosial ekonomi, dan lain sebagainya (Borrini-Feyerabend, 1996). Konteks inilah yang nantinya akan menciptakan peluang dan kendala dalam parameter umum CGR.

2) *Drivers* (Pengemudi)

Drivers merupakan faktor pendorong dalam model *collaborative governance regime* dimana pengemudi dalam hal ini berperan untuk menginisiasi terjadinya proses kolaborasi antar pihak yang terlibat. Unsur pengemudi dalam hal ini meliputi kepemimpinan, insentif konsekuensial, saling ketergantungan, dan ketidakpastian.

3) *Collaboration Dynamics*

a. *Principled Engagement* (Keterlibatan Berprinsip)

Keterlibatan berprinsip dihasilkan dan dipertahankan melalui proses interaksi yang menghasilkan penemuan definisi, pertimbangan, dan penentuan. Proses keterlibatan yang kuat akan menghasilkan keputusan yang adil, efektif, dan tahan lama.

b. *Shared Motivation* (Motivasi Bersama)

Motivasi bersama terbentuk dari interaksi yang berulang dan berkualitas melalui tahapan keterlibatan berprinsip guna menumbuhkan kepercayaan, saling pengertian, legitimasi internal dan komitmen bersama

c. *Capacity for Joint Action* (Kapasitas untuk bertindak bersama)

Kapasitas untuk bertindak bersama dalam hal ini dikonseptualisasikan sebagai kombinasi dari empat elemen penting yakni pengaturan prosedural dan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. Elemen tersebut harus cukup untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

4) *Action* (Tindakan Kolaborasi)

Action dalam model *collaborative governance* regime merupakan sebuah tindakan kolaborasi yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut misalnya memperoleh dukungan, mendidik konstituen/publik, menerbitkan peraturan perundang-undangan, menyusun sumber daya eksternal, mengerahkan staf, monitoring kegiatan, dan lain sebagainya.

5) *Impact* (Dampak)

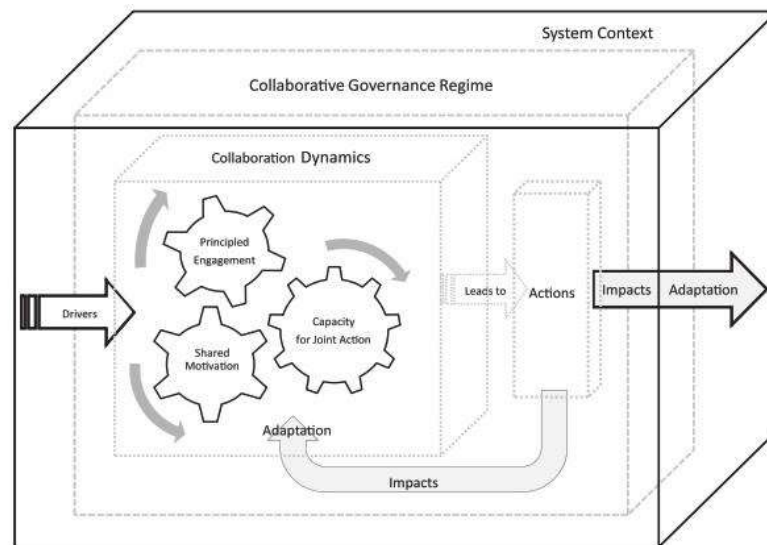
Dampak dapat diartikan sebagai sebuah hasil dari tindakan yang didorong oleh dinamika kolaboratif. Dampak juga bisa diartikan sebagai perubahan keadaan yang disengaja/tidak disengaja dalam konteks sistem. Dampak dapat berupa fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik, yang bersifat jangka panjang maupun pendek.

6) *Adaptation* (Adaptasi)

Adaptasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengubah konteks situasi atau masalah yang kompleks. Dalam hal ini dinamika kolaborasi mengidentifikasi adanya potensi perubahan

transformatif sebagai respon dari dampak yang dihasilkan oleh CGR. Gambaran dari model (*Collaborative Governance Regime*) CGR yang dikemukakan oleh Emerson dkk adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1
Model Dinamika *Collaborative Governance* Emerson et.al



Sumber : Kirk Emerson, Tina Nabatchi, Stephen Balogh (2011)

Model *collaborative governance* yang sebelumnya dikemukakan oleh Ansell dan Gash juga terdiri dari beberapa tahapan yakni meliputi :

1) *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007:158-161) terdiri dari lima tahapan kolaborasi yaitu : 1) bertatap muka, 2) membangun kepercayaan, 3) proses dalam mencapai komitmen, 4) pemahaman atas keputusan bersama, 5) hasil sementara. Bertatap muka dilakukan dengan tujuan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama antara seluruh *stakeholders* yang terlibat. Membangun kepercayaan adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program,

kepercayaan dapat berupa informasi atau usaha yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam mencapai tujuan. Proses dalam mencapai komitmen artinya membangun keyakinan atau motivasi kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat untuk aktif berpartisipasi dalam terlaksananya sebuah program atau kebijakan. Pemahaman atas keputusan bersama menyangkut beberapa hal yang harus dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Hasil sementara adalah capaian yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan yang dijalankan, namun belum sampai pada tahap akhir.

2) *Starting Conditions* (Kondisi Awal)

Menurut Ansell dan Gash (2007:551) terdapat tiga variabel penting yang berpengaruh terhadap kondisi awal munculnya *collaborative governance* yang meliputi, ketidakseimbangan sumber daya, sejarah yang melatarbelakangi, dan insentif untuk berpartisipasi. Kondisi awal munculnya kolaborasi biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* dalam menjalankan atau mengelola sebuah program/ kebijakan. Faktor sejarah dari suatu program atau kebijakan juga menjadi salah satu penyebab munculnya kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholders*. Berikutnya dari sisi insentif diharapkan dengan adanya insentif selama kolaborasi dapat mempermudah jalannya suatu program atau kebijakan.

3) *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan fasilitatif menurut Ansell dan Gash (2007:554)

“leadership is crucial for settings and maintaining celar ground rules, building trust, facilitating dialogue, and exploring mutual gains”.

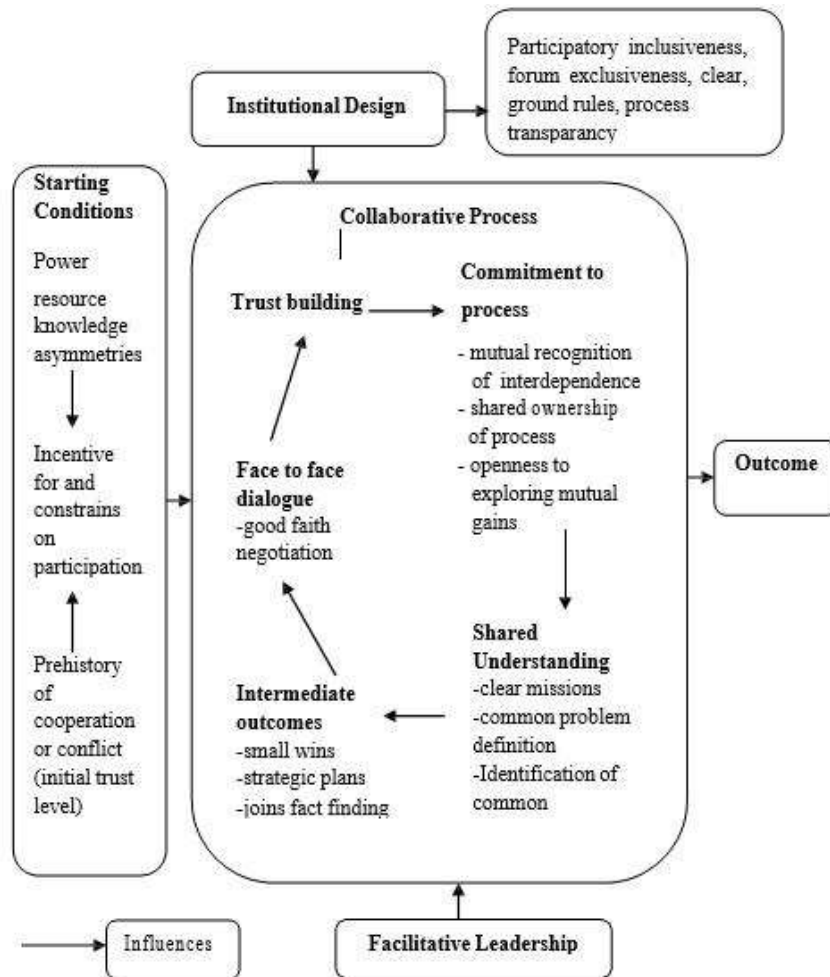
Kepemimpinan yang bersifat fasilitatif berperan penting dalam proses *collaborative governance*. Fungsi dari kepemimpinan fasilitatif adalah membawa semangat kolaborasi kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat. Kepemimpinan fasilitatif berpengaruh besar terhadap jalannya proses kolaborasi, sebab kepemimpinan yang fasilitatif akan menggerakkan, menginisiasi, dan memberdayakan seluruh aktor yang terlibat dalam jalannya sebuah program. Pemimpin yang fasilitatif memiliki beberapa kriteria antara lain: a) memperluas relasi atau jaringan, b) memastikan pengaruh dan kontrol yang luas, c) memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif.

4) *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Desain kelembagaan atau institusi menurut Murdock dalam (Ansell and Gash, 2007:556) mengacu pada aturan dasar *collaborative governance* yang jelas dan konsisten, mengaktualisasikan para pemangku kepentingan bahwa prosesnya adil dan terbuka (transparan). Sejalan dengan pernyataan tersebut, De Save dalam Sudarmo (2011:115) menyatakan salah satu indikator keberhasilan *collaborative governance* adalah adanya kepastian siapa saja *stakeholders* yang berpartisipasi, aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan program, dan fokus yang terbatas dari masing-masing *stakeholders*. Karena itulah

sangat penting memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam model *collaborative governance*, agar kolaborasi antar *stakeholders* dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Gambaran model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada gambar 1.1 di halaman berikutnya.

Gambar 1.2
Model Collaborative Governance Ansell dan Gash



Sumber : Ansell dan Gash (2007:550)

Berdasarkan kedua model *collaborative governance* di atas maka peneliti memilih untuk menggunakan model kombinasi dari Emerson et al dan juga Ansell & Gash. Alasan dipilihnya model kombinasi tersebut dikarenakan peneliti ingin melihat secara lebih kompleks proses dan dinamika kolaborasi antar aktor yang terjadi dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana di Kel.Tanjung Mas Kota Semarang. Selain itu model kombinasi juga berguna untuk menggali informasi secara lebih mendalam tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses kolaborasi.

1.6.4.3 Karakteristik *Collaborative Governance*

Karakteristik *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007:544) adalah sebagai berikut :

1) Forum diprakarsai oleh organisasi pemerintah

Pembentukan sebuah forum dalam proses *collaborative governance* diinisiasi atau diprakarsai oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

2) Peserta dalam forum termasuk aktor non pemerintah peserta dari forum yang telah dibuat terdiri dari pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat yang telah disepakati bersama.

3) Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kolektif dan tidak hanya dikonsultasikan oleh badan publik. Proses pengambilan keputusan dalam *collaborative governance* melibatkan seluruh *stakeholders* secara langsung tanpa melalui perwakilan.

4) Forum disusun secara formal dan bertemu secara kolektif

Berdirinya sebuah forum yang diprakarsai oleh pemerintah kemudian dibuatkan Surat Keputusan (SK) yang mengukuhkan berdirinya forum tersebut. Pertemuan forum dilakukan secara kolektif dalam sebuah rapat kerja.

5) Forum bertujuan untuk mengambil keputusan dengan konsensus

Forum yang telah berdiri dan beranggotakan seluruh *stakeholders* yang terlibat selanjutnya menyusun sebuah program/kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan keputusan bersama seluruh peserta forum.

6) Fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik atau manajemen publik

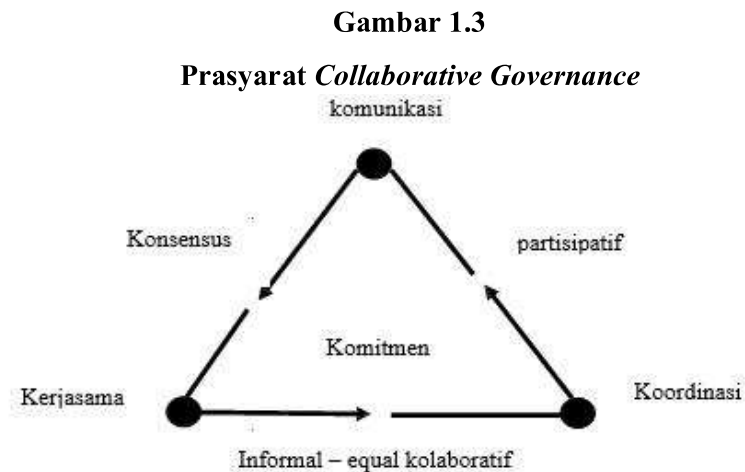
Proses kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholders* berfokus pada sebuah kebijakan atau pengelolaan program tertentu.

Dengan adanya karakteristik *collaborative governance* tersebut membuat proses kolaborasi yang dilakukan dalam program kelurahan tangguh bencana berjalan lebih kompleks karena melibatkan berbagai *stakeholders*.

1.6.4.4 Prasyarat *Collaborative Governance*

Proses *collaborative governance* dapat terjadi apabila memenuhi beberapa prasyarat yang telah ditentukan. Menurut Abdurrahman (2014:9) dalam *collaborative governance* terdapat tiga aspek penting yang menjadi prasyarat agar kolaborasi antar *stakeholders* dapat berjalan yakni: 1) komunikasi, 2) kerjasama, 3) koordinasi. Ketiga aspek tersebut

dijalankan atas dasar komitmen bersama antar *stakeholders* dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Aspek *collaborative governance* dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber : Abdurrahman (2014:9)

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa *collaborative governance* yang baik haruslah memenuhi 3 (tiga) prasyarat yang ada yakni, komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Ketiga prasyarat tersebut didukung dengan adanya konsensus, partisipatif, serta informal-equal kolaboratif dari masing-masing *stakeholders* yang terlibat. *Collaborative governance* yang terjadi dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana akan berjalan lebih efektif apabila prasyarat tersebut dapat terpenuhi.

1.6.5 Kelurahan Tangguh Bencana

1.6.5.1 Definisi Kelurahan Tangguh Bencana

Berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) BNPB No 1 Tahun 2012, desa/kelurahan tangguh bencana adalah sebuah desa/kelurahan yang telah

memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menghadapi segala macam ancaman bencana, dan memiliki kemampuan untuk memulihkan diri secepat mungkin dari dampak bencana yang telah melanda. Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana di setiap daerah guna mendukung kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam maupun non alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Upaya pemerintah dalam mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana salah satunya melalui forum pengurangan risiko bencana yang ada di desa/kelurahan tangguh bencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Forum tersebut berfungsi sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan atau *stakeholders* untuk saling berkoordinasi dalam setiap kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana secara konsultatif dan partisipatif. Selain forum pengurangan risiko bencana, dalam desa/kelurahan tangguh bencana juga terdapat kelompok siaga bencana/pengurangan risiko bencana yang terdiri dari masyarakat dan tim relawan yang bertugas untuk menjadi pelopor dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana di suatu daerah. Salah satu cara yang dilakukan oleh kelompok siaga bencana dalam mensosialisasikan kegiatannya adalah dengan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pemerintah desa/kelurahan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat juga berupaya untuk memberikan bekal dan pelatihan terhadap masyarakat guna meningkatkan kemampuan

mereka dalam upaya pengurangan risiko bencana, baik pada kondisi pra bencana maupun pasca benca, serta kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.

1.6.5.2 Tujuan Kelurahan Tangguh Bencana

Desa/kelurahan tangguh bencana memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam rangka penanggulangan bencana. Tujuan kelurahan tangguh bencana tersebut tertuang dalam Perka BNPB No 1 Tahun 2012 yang terdiri dari :

- 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan teknis dan sumber daya bagi pengurangan risiko bencana di daerah.
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam mengelola sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana
- 3) Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana meliputi pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, kelompok masyarakat dan organisasi lain yang peduli terhadap risiko bencana.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memelihara kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana di daerah.
- 5) Melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dan berpotensi menimbulkan kerugian akibat dampak dari bencana yang terjadi.

Dengan ditetapkannya tujuan desa/kelurahan tangguh bencana tersebut diharapkan seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana dapat saling berkolaborasi sehingga sumber daya dan sarana, prasarana yang dibutuhkan dalam program kelurahan tangguh bencana dapat terpenuhi, dan pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.6.5.3 Kriteria Kelurahan Tangguh Bencana

Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana mengacu pada kerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo, yang didalamnya terdapat aspek tata kelola, pengkajian risiko, peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, dan aspek kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Untuk mencapai aspek-aspek tersebut pemerintah melalui Perka BNPB No 1 Tahun 2012 telah menetapkan beberapa kriteria yang termasuk dalam desa/kelurahan tangguh bencana berdasarkan aspek yang telah dicapai. Desa/kelurahan tangguh bencana dibagi menjadi tiga kriteria yakni Utama, Madya, dan Pratama sebagai berikut:

1) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama

Desa/kelurahan tangguh bencana tingkat utama adalah desa/kelurahan yang mempunyai peringkat tertinggi dalam kategori desa/kelurahan tangguh bencana yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Memiliki kebijakan pengurangan risiko bencana yang dibentuk dan dilegalkan melalui peraturan desa atau setingkat kelurahan.
- b) Memiliki dokumen penanggulangan bencana yang dimasukkan ke dalam RPJMDes, serta dirinci dalam RKPDes
- c) Memiliki forum pengurangan risiko bencana yang beranggotakan kelompok masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- d) Memiliki tim relawan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan serta memberikan pendidikan, dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kebencanaan.
- e) Adanya upaya-upaya yang sistematis dalam pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan yang meliputi kegiatan ekonomi produktif kreatif untuk mengurangi kerentanan.
- f) Adanya upaya-upaya sistematis yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menanggapi bencana.

2) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya

Desa/kelurahan tangguh bencana tingkat madya adalah sebuah desa/kelurahan yang termasuk ke dalam tingkat menengah dalam kategori desa/kelurahan tangguh bencana yang dapat dicirikan sebagai berikut :

- a) Memiliki kebijakan pengurangan risiko bencana yang sedang dikembangkan di tingkat desa/kelurahan.

- b) Memiliki dokumen penanggulangan bencana yang telah tersusun namun belum diintegrasikan kedalam instrumen perencanaan desa.
- c) Memiliki forum pengurangan risiko bencana yang beranggotakan kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat namun belum berfungsi secara penuh.
- d) Adanya tim relawan dalam penanggulangan bencana di desa/kelurahan yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, pengetahuan, dan peningkatan kapasitas, namun kegiatan tersebut belum berjalan secara rutin.
- e) Adanya upaya untuk pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan melalui kegiatan ekonomi produktif kreatif, namun belum teruji keberhasilannya.
- f) Adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, namun belum teruji secara sistematis.

3) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama

Desa/kelurahan tangguh bencana tingkat pratama adalah desa/kelurahan yang berada pada tingkat awal dalam kategori desa/kelurahan tangguh bencana yang dapat dicirikan sebagai berikut :

- a) Adanya upaya-upaya awal dalam menyusun rencana pengurangan risiko bencana di tingkat desa/kelurahan.
- b) Adanya upaya-upaya awal dalam menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana

- c) Adanya upaya-upaya awal dalam membentuk forum pengurangan risiko bencana yang beranggotakan dari perwakilan masyarakat.
- d) Adanya upaya-upaya awal dalam membentuk tim relawan penanggulangan bencana di desa/kelurahan.
- e) Adanya upaya-upaya awal dalam pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan.
- f) Adanya upaya-upaya awal dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menanggapi bencana.

1.6.5.4 Aspek dan Indikator Kelurahan Tangguh Bencana

Berdasarkan Perka BNPB No.1 Tahun 2021 desa/kelurahan tangguh bencana memiliki beberapa aspek dan indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana. Aspek dalam kelurahan tangguh bencana meliputi :

1) Aspek Legislasi

Aspek legislasi dalam kelurahan tangguh bencana terkait dengan kebijakan-kebijakan yang disusun dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan kelurahan tangguh bencana melalui berbagai peraturan dan regulasi.

2) Aspek Perencanaan

Aspek perencanaan dalam kelurahan tangguh bencana mencakup dokumen-dokumen kebencanaan diantaranya rencana aksi pengurangan bencana, rencana kontijensi, rencana penanggulangan bencana (RPB), rencana evakuasi, dan rencana peringatan dini (*EWS*).

3) Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan dalam kelurahan tangguh bencana mencakup pembentukan forum pengurangan risiko bencana (FPRB) yang anggotanya terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan *NGO*.

4) Aspek Pendanaan

Pendanaan dalam program kelurahan tangguh bencana berasal dari berbagai sumber antara lain, APBD Kab/Kota, APBDes/ADD, dana swadaya masyarakat, dan sumbangan dari pihak swasta melalui program CSR perusahaan.

5) Aspek Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas dalam kelurahan tangguh bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, pembinaan, dll.

6) Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Aspek penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana meliputi beberapa tahapan diantaranya mitigasi bencana, sistem peringatan dini, kesiapan dan kesiapsiagaan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Terdapat pula indikator yang menjadi acuan dalam hal penanggulangan bencana yang ada di Desa/Kelurahan meliputi :

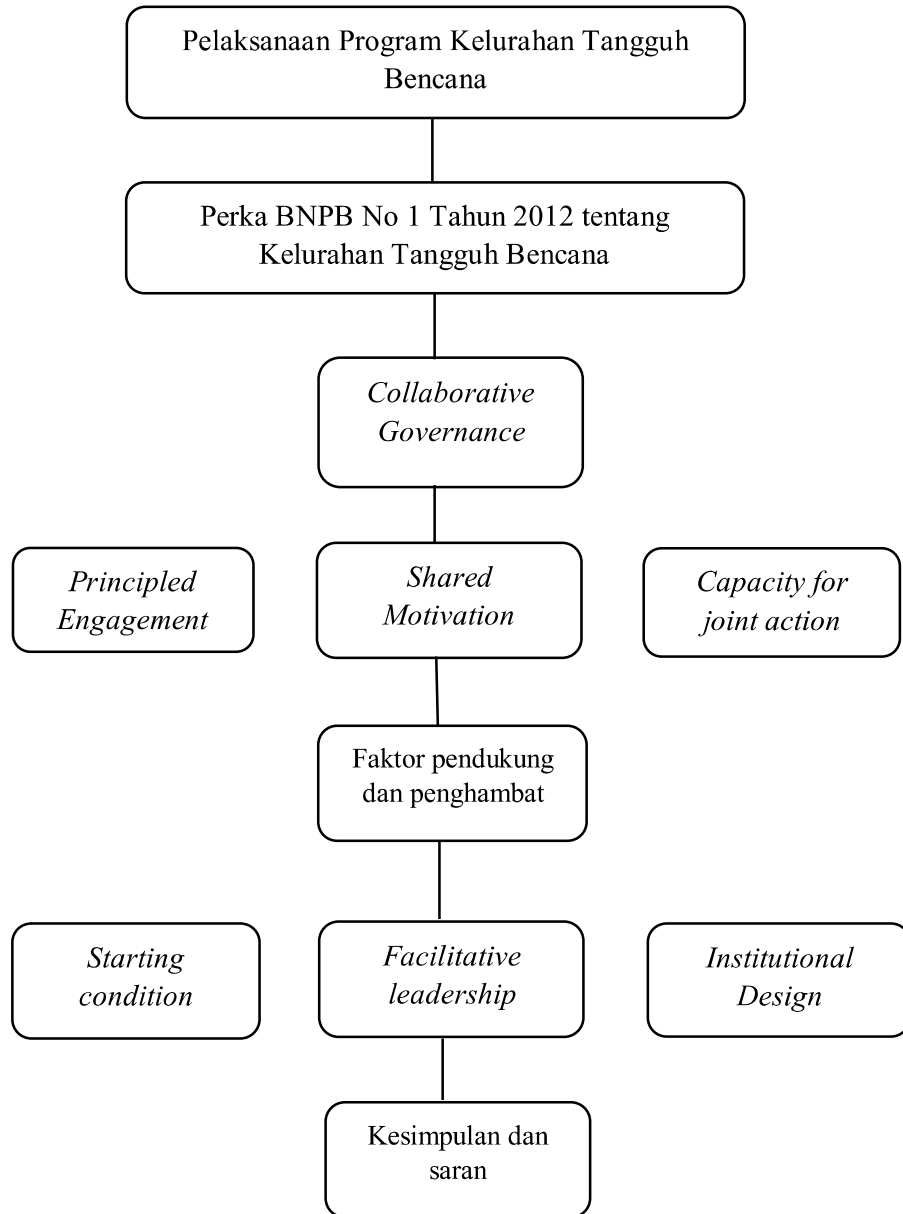
- 1) Kebijakan/peraturan di Desa/Kelurahan tentang PB/PRB
- 2) Rencana penanggulangan bencana, rencana aksi komunitas, dan rencana kontingensi

- 3) Forum PRB
- 4) Relawan Penanggulangan Bencana
- 5) Kerjasama antar pelaku dan wilayah
- 6) Dana tanggap darurat
- 7) Dana untuk PRB
- 8) Pelatihan untuk pemerintahan desa/kelurahan
- 9) Pelatihan untuk tim relawan
- 10) Pelatihan untuk warga desa
- 11) Pelibatan/partisipasi warga desa
- 12) Pelibatan perempuan dalam tim relawan
- 13) Peta dan kajian risiko
- 14) Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian
- 15) Sistem peringatan dini
- 16) Pelaksanaan mitigasi struktural
- 17) Pola ketahanan ekonomi
- 18) Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan
- 19) Pengelolaan sumber daya alam untuk PRB
- 20) Perlindungan aset produktif utama masyarakat

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir berguna untuk memudahkan peneliti dalam menulis laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun kerangka pemikiran teoritis yang telah disusun oleh peneliti dalam program katana dapat dilihat pada gambar 1.4 pada halaman berikutnya.

Gambar 1.4
Kerangka Berpikir Teoritis



1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai prosedur ilmiah untuk mengumpulkan setiap data yang dibutuhkan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu penelitian yang dilakukan juga harus berdasarkan aturan-aturan atau kaidah yang berlaku agar penelitian tersebut dapat dinyatakan valid. Data yang diperoleh dari hasil penelitian haruslah mencakup aspek rasional, sistematis, dan empiris sehingga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang ada pada subjek penelitian melalui berbagai metode kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata maupun kalimat. Sedangkan menurut Sugiyono (2018:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk melihat kondisi obyek secara alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Auerbach dan Silverstein dalam Sugiyono (2018:3) menyatakan bahwa *“qualitative research is research that involves analyzing and interpreting texts and interviews in order to discover meaningful patterns descriptive of a particular phenomenon”*. Berdasarkan pernyataan

tersebut dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan teks serta mereview hasil penelitian tersebut dengan tujuan untuk menemukan sebuah makna dari fenomena yang terjadi. Selain itu Creswell dalam Sugiyono (2018:4) juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah proses untuk mengeksplorasi dan memahami perilaku individu dan kelompok, serta menggambarkan masalah sosial dan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana berbasis *collaborative governance* di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Selain itu penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor pengambat yang mempengaruhi pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana. Dipilihnya metode penelitian kualitatif oleh peneliti bertujuan untuk melihat fenomena secara langsung terkait dengan pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana yang ada di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

1.8.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan yang ada dalam penelitian kualitatif yang biasanya berisi tentang pokok-pokok masalah yang masih bersifat umum. Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan fisibilitas masalah yang ingin dipecahkan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, dan biaya (Sugiyono, 2018:55). Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih

berdasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang berasal dari situasi sosial (lapangan). Fokus merupakan sebuah fenomena/domain tunggal serta beberapa domain yang berkaitan dengan situasi sosial. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 dan gabungan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007:550) serta Emerson et al (2011), maka peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan program kelurahan tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi dinamika *collaborative governance* yang terjadi antar aktor dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana berbasis *collaborative governance* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah sebuah tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Alasan dipilihnya Kel.Tanjung Mas sebagai lokasi penelitian dikarenakan wilayah Kel.Tanjung Mas merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang sering dilanda bencana banjir, rob, dan kebakaran. Rob menjadi bencana tahunan di Kel.Tanjung Mas yang disebabkan oleh

beberapa hal diantaranya abrasi, kesalahan pemanfaatan lahan, penurunan muka tanah, eksploitasi air tanah yang berlebihan, serta pemanasan global (*jateng.suara.com*). Selain itu Kel.Tanjung Mas juga termasuk ke dalam kawasan sentral logistik dan transportasi dimana terdapat banyak industri-industri besar sehingga perlu dilindungi dari ancaman bencana.

Situs penelitian yang dipilih untuk mengumpulkan data dan informasi adalah beberapa *stakeholders* dari pihak pemerintah dan juga beberapa *stakeholders* di luar sektor pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana. Adapun *stakeholders* dari pihak pemerintah yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan Semarang Utara, dan Kelurahan Tanjung Mas. Kemudian *stakeholders* non pemerintah yang terlibat dalam program ini antara lain pihak swasta yakni NGO atau LSM, dan Kelompok Siaga Bencana (KSB).

Dilibatkannya pihak swasta dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana adalah sebagai *supporting system* untuk lebih mengoptimalkan peran dari pemerintah sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Alasan lain dipilihnya beberapa OPD dan organisasi non pemerintah yang ada di Kota Semarang menjadi situs penelitian dikarenakan program kelurahan tangguh bencana dilaksanakan melalui mekanisme kolaborasi yang melibatkan banyak *stakeholders*, sehingga diperoleh data dari masing-masing *stakeholders* agar informasi yang diperoleh menjadi semakin banyak.

1.8.4 Fenomena Penelitian

Penelitian dengan tema pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana berbasis *collaborative governance* ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana di Kel.Tanjung Mas yang melibatkan berbagai *stakeholders*. Kolaborasi tersebut terdiri dari aktor pemerintah dan non pemerintah. Fenomena penelitian yang ada dalam program kelurahan tangguh bencana telah dirangkum sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana berbasis *Collaborative Governance* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang yang dianalisis berdasarkan teori *Collaborative Governance Regime (CGR)* dan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012.

- a. Keterlibatan berprinsip (*principled engagement*)

Keterlibatan berprinsip dihasilkan dan dipertahankan melalui proses interaksi yang menghasilkan penemuan definisi, pertimbangan, dan penentuan. Proses keterlibatan yang kuat akan menghasilkan keputusan yang adil, efektif, dan bertahan dalam jangka waktu yang lama.

- b. Motivasi bersama (*shared motivation*)

Motivasi bersama terbentuk dari interaksi yang berulang dan berkualitas melalui tahapan keterlibatan berprinsip guna menumbuhkan kepercayaan dan saling mengerti, legitimasi internal, dan komitmen bersama antar aktor yang terlibat.

- c. Kapasitas untuk bertindak bersama (*capacity for join action*)

Kapasitas untuk bertindak bersama dalam hal ini dikonseptualisasikan sebagai kombinasi dari beberapa elemen penting yakni pengaturan prosedural dan kelembagaan, kepemimpinan, dan sumber daya. Elemen tersebut kemudian menjadi acuan untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.

d. Legislasi

Legislasi merupakan sebuah proses dalam menyusun seperangkat aturan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program katana. Legislasi dalam program katana meliputi berbagai aturan yang diterbitkan dalam rangka mengurangi risiko bencana baik yang ada di tingkat pusat maupun di daerah.

e. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan dalam program katana yang dilakukan setelah legislasi selesai dan memperoleh legalitas. Tahap perencanaan dalam hal ini meliputi penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana, rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana kontijensi, rencana evakuasi, dll.

f. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan suatu tatanan atau pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling terikat dalam sebuah wadah untuk mencapai tujuan bersama. Sistem kelembagaan dalam program katana meliputi pembentukan forum pengurangan resiko

bencana, kelompok siaga bencana, relawan siaga bencana, kelengkapan personil dari berbagai kalangan.

g. Pendanaan

Pendanaan merupakan aspek penting dalam program katana yang bertujuan untuk mengumpulkan anggaran guna membiayai berbagai keperluan yang dibutuhkan. Aspek pendanaan tersebut terdiri dari anggaran khusus yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana yang berasal dari APBD, dana swadaya masyarakat, dan sumbangan dari pihak luar yang peduli terhadap masalah kebencanaan.

h. Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas mengacu pada proses dimana individu, kelompok, atau organisasi yang berupaya untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas mereka dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengembangan kapasitas dalam program katana meliputi edukasi tim relawan dan KSB melalui sosialisasi dan pelatihan, pemenuhan kelengkapan sarana, prasarana, dan logistik, serta keterlibatan dari organisasi pemuda dan perempuan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

i. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengurangi risiko bencana yang ada di suatu daerah meliputi : 1) pemetaan, analisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas kelurahan, 2) pembuatan jalur evakuasi, peta

bencana, dan tempat pengungsian, 3) sistem peringatan dini berbasis masyarakat, 4) pembangunan fisik (tanggul sungai, pemecah ombak, dst), 5) pengembangan kegiatan ekonomi (memperluas akses pasar, peningkatan produksi, pemberian bantuan, dst), 6) pengelolaan sumber daya alam (sungai, pantai, laut, dst), 7) Perlindungan terhadap aset-aset produktif masyarakat (asuransi komunitas, gudang bersama dst) dari dampak bencana.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang yang dianalisis berdasarkan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007:550) terdiri dari :

a. Kondisi awal

Kondisi awal merupakan tahapan dimana kolaborasi akan diinisiasi dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang nantinya dapat mempengaruhi pelaksanaan sebuah program atau kebijakan. Dalam praktinya kondisi awal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program katana meliputi ketidakseimbangan sumber daya, insentif yang dimiliki pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, dan sejarah yang melatarbelakangi.

b. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar dalam berkolaborasi yang akan menjadi legitimasi prosedural dari rangkaian kolaborasi yang dilakukan. Desain kelembagaan dalam

pelaksanaan program katana meliputi aturan dasar yang jelas, *stakeholders* yang terlibat, serta adanya transparansi.

c. Kepemimpinan fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan jenis kepemimpinan yang mengedepankan unsur efektivitas dalam mencapai tujuan dengan memberikan dorongan serta fasilitasi kepada suatu kelompok. Unsur kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi pelaksanaan program katana meliputi pengaruh dan kontrol yang luas, fasilitasi kelompok yang produktif, dan memperluas relasi atau jaringan antar aktor.

Tabel 1.9
Fenomena Penelitian

Fenomena	Aspek	Indikasi Penelitian
<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana	Keterlibatan Berprinsip	a. Penemuan proses awal dibentuknya program katana di Kel.Tanjung Mas b. Bentuk pertimbangan atas saran dan aspirasi yang disampaikan melalui kegiatan musyawarah c. Penentuan terhadap keputusan dan kebijakan yang akan diambil dalam program katana
	Motivasi Bersama	a. Kepercayaan dan rasa saling menghargai antar aktor yang terlibat dalam program katana. b. Legitimasi internal dari keseluruhan aktor yang terlibat dalam skema kolaborasi. c. Komitmen bersama antar aktor yang saling terlibat dalam program katana
		a. Prosedural dan Kelembagaan

	Kapasitas Bertindak Bersama	yang diperlukan selama pelaksanaan program katana b. Kepemimpinan yang dilakukan selama proses kolaborasi c. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk kegiatan katana di Kel.Tanjung Mas
	Legislasi	a. Terkait dengan penyusunan peraturan yang mengatur tentang pengurangan risiko bencana yang ada di tingkat Kelurahan dan Kab/Kota.
	Perencanaan	a. Penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan program katana di Kel.Tanjung Mas
	Kelembagaan	a. Pembentukan struktur kelembagaan yang diperlukan selama pelaksanaan program katana. b. Kerjasama yang terjalin antar <i>stakeholders</i> baik dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta
	Pendanaan	a. Alokasi anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program katana di Kel.Tanjung Mas
	Pengembangan Kapasitas	a. Kegiatan peningkatan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan non alam
	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	a. Upaya penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana terjadi. b. Peran serta dari para

		<i>stakeholders</i> yang tergabung dalam program katana
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana berbasis <i>Collaborative Governance</i>	Kondisi Awal	a. Ketidakseimbangan sumberdaya antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam program katana b. Insentif yang dimiliki oleh pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi c. Sejarah yang melatarbelakangi keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam program katana
	Desain Kelembagaan	a. Partisipasi yang inklusif dari seluruh pihak yang terlibat dalam program katana b. Aturan dasar atau regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan kolaborasi dalam program katana c. Transparansi dari keseluruhan kegiatan katana yang telah dilaksanakan
	Kepemimpinan Fasilitatif	a. Pengaruh dan kontrol yang luas kepada seluruh <i>stakeholders</i> yang terlibat b. Memperluas relasi atau jaringan dengan <i>stakeholders</i> lain untuk mengembangkan program katana c. Fasilitasi yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam upaya peningkatan produktivitas kegiatan penanggulangan bencana.

Sumber : Data olahan peneliti, 2024

1.8.5 Sumber Data

Kelengkapan sumber data dalam sebuah penelitian memudahkan untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat mengenai berbagai hal yang terkait dengan topik penelitian. Dalam hal ini sumber data yang digunakan untuk mempermudah penelitian yakni data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diberikan secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:104). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber serta observasi langsung dengan tujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana berbasis *collaborative governance* di Kel.Tanjung Mas Kota Semarang

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:104). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi, laporan, berita, peraturan perundang-undangan, dan artikel maupun jurnal yang dapat menunjang proses penelitian terkait dengan pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana dan *collaborative governance*. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan berasal dari :

- 1) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 2) Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

- 3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- 4) Renstra BPBD Kota Semarang
- 5) RKA BPBD Kota Semarang
- 6) Laporan-laporan terkait penyelenggaraan kelurahan tangguh bencana
- 7) Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas tentang katana dan *collaborative governance*.

1.8.6 Informan

Informan penelitian merupakan seseorang yang terlibat dalam penelitian dan bertugas memberikan keterangan atau informasi langsung terkait dengan situasi dan kondisi lingkungan yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini informan merupakan kunci utama dalam penelitian kualitatif (Moleong 2017:163). Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive* dan *Snowball* dalam menentukan narasumber (informan) dengan alasan bahwa teknik *Purposive* dan *Snowball* dapat membantu dalam menggali informasi secara lebih mendalam melalui pemilihan informan utama dan informan tambahan sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak. Narasumber atau informan yang dipilih adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang, alasan dipilihnya informan tersebut karena dengan tujuan ingin mengetahui informasi terkait peran BPBD dalam pelaksanaan katana.
- 2) Staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang, pemilihan informan tersebut berdasarkan saran dari kepala bidang yang

bertujuan untuk mencari informasi yang lebih mendalam tentang kolaborasi dalam pelaksanaan program katana di Kel.Tanjung Mas.

- 3) Staff Dinas Sosial Pemerintah Kota Semarang, alasan dipilihnya informan tersebut berdasarkan saran dari pihak BPBD untuk memperoleh informasi terkait bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah selama proses kolaborasi berjalan dalam menanggulangi bencana di Kel.Tanjung Mas.
- 4) Lurah Kelurahan Tanjungmas, alasan dipilihnya informan bertujuan untuk memperoleh informasi terkait peran dari tokoh masyarakat, serta lembaga kelurahan dalam pelaksanaan program katana.
- 5) Ketua RW 15 Tambak Lorok, alasan dipilihnya informan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Lurah Kel.Tanjung Mas untuk mengetahui Upaya dari penggiat sosial dalam mewujudkan program katana di Kel.Tanjung Mas.
- 6) Sekretaris Kecamatan Semarang Utara, alasan dipilihnya informan tersebut bertujuan untuk mengetahui informasi terkait peran dari pihak Kecamatan Semarang Utara dalam pelaksanaan program katana.
- 7) Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, alasan dipilihnya informan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui peran dari Dinas Pekerjaan Umum selama proses kolaborasi berjalan dalam menangani bencana di wilayah Kel.Tanjung Mas.
- 8) Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Semarang, alasan dipilihnya informan tersebut berdasarkan rekomendasi dari pihak

BPBD untuk mengetahui keterlibatan FPRB dalam proses kolaborasi dengan aktor-aktor lain dalam program katana di Kel.Tanjung Mas.

9) Babinsa Kelurahan Tanjung Mas, alasan dipilihnya informan tersebut berdasarkan saran dari Lurah Tanjung Mas adalah untuk mengetahui peran TNI dalam berkolaborasi dalam mewujudkan program katana di Kel.Tanjung Mas.

10. Perwakilan anggota HIPMI Jateng, alasan dipilihnya informan tersebut adalah untuk mengetahui keterlibatan HIPMI dalam proses kolaborasi selama pelaksanaan program katana di Kel.Tanjung Mas.

1.8.7 Instrumen Penelitian

Terdapat dua hal yang berpengaruh besar terhadap kualitas data hasil penelitian kualitatif yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data (Sugiyono, 2018:101). Instrumen penelitian berguna untuk memudahkan ketika melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument adalah sebagai berikut:

a) Peneliti Sendiri

Instrumen tersebut menjadi instrumen kunci yang berpengaruh dalam penelitian kualitatif. Tugas dari peneliti dalam penelitian kualitatif adalah untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan melaporkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

b) Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai panduan pada saat melakukan *interview* atau wawancara dengan narasumber. Pedoman wawancara

menjadi sebuah dasar untuk menggali informasi kepada narasumber secara terstruktur dan sistematis.

c) Catatan Lapangan

Catatan lapangan berguna untuk membantu dalam mencatat hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Dengan adanya catatan lapang tersebut memudahkan untuk mencari informasi dan menyusun laporan hasil penelitian.

d) Alat penunjang lain

selain ketiga instrumen di atas terdapat alat penunjang lain yang seringkali digunakan pada saat melakukan penelitian di lapangan. Alat penunjang tersebut antara lain handphone, ballpoint, buku catatan, serta alat pendukung lainnya yang diperlukan dalam penelitian.

1.8.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk memperoleh data (Sugiyono, 2018:104). Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu dengan wawancara (*interview*), observasi (pengamatan), dan juga dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara *interview* secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan topik penelitian. Wawancara

dilakukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait topik penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan penting yang terstruktur kepada narasumber. Kegiatan wawancara dilakukan dengan cara datang langsung ke OPD dan beberapa *stakeholders* lain di luar sektor pemerintah untuk melihat bagaimana pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana serta dinamika kolaborasi yang terjalin antar *stakeholders* dalam program tersebut.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian kemudian mencatatnya secara terstruktur dan sistematis. Observasi yang dilakukan menyangkut berbagai kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap *stakeholders* dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan melihat dokumen-dokumen penting yang terkait dengan topik penelitian. Dokumentasi dapat berupa buku laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, foto, berita, serta jurnal dan artikel yang dapat digunakan untuk melengkapi data hasil penelitian.

1.8.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta

dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi :

a) *Data Collection* (Pengumpulan data)

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam analisis data model interaktif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan semua data hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Data tersebut selanjutnya disaring kembali pada tahap reduksi data untuk memilih data mana yang dianggap penting.

b) *Data Reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data-data penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memilah, mengkategorikan dan membuat rangkuman dari hasil penelitian yang dilakukan.

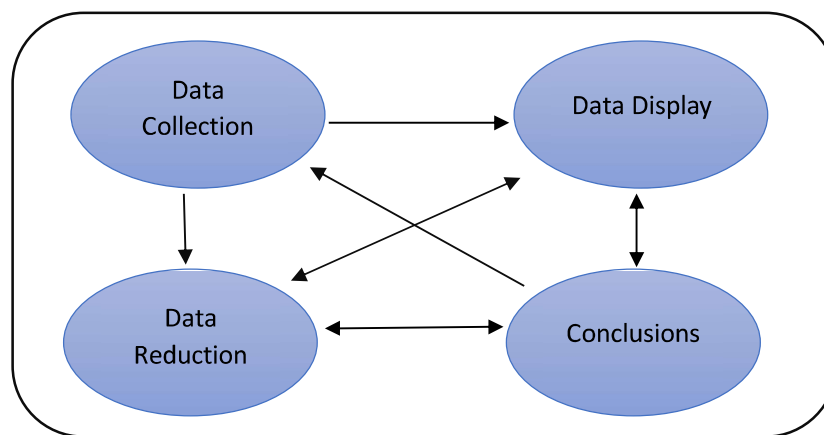
c) *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi wawancara. Data yang sudah disajikan dalam bentuk narasi wawancara diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga dapat dianalisis dengan cepat dan mudah.

d) *Conclusion drawing/verification* (Penarikan kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, selanjutnya dibuatlah kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya.

Gambar 1.5
Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman (dalam Sugiyono : 2018)

Model analisis data tersebut dipilih untuk menggambarkan pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang bekerjasama dengan beberapa *stakeholders* lain baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah.

1.8.10 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan validitas dan realibitas data hasil penelitian. Validitas data adalah derajat ketetapan antara data yang dilaporkan dengan fenomena sesungguhnya yang terjadi di lapangan, sedangkan realibilitas data adalah derajat konsistensi atau

stabilitas data yang dihasilkan dari penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan standar tertentu dalam menguji keabsahan data penelitian yang telah dilakukan. Teknik triangulasi data digunakan untuk menentukan keabsahan data hasil penelitian. Triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data hasil penelitian dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara dan pemilihan waktu yang tepat (Sugiyono, 2018:189). Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari narasumber satu dengan narasumber yang lain. Sedangkan triangulasi teknik pengumpulan data digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil triangulasi tersebut kemudian diperoleh informasi yang valid terkait dengan data hasil penelitian.